



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8205-8212

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Struktur Sosial Dalam Proses Marginalisasi Komunitas Adat Malaka

Jeni Mathelda Ataupah^{1✉}

Universitas Nusa Cendana Kupang

Email: jeni.mathelda@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran struktur sosial dalam proses marginalisasi komunitas adat di Malaka. Komunitas adat Malaka, yang memiliki tradisi dan budaya unik, mengalami tekanan sosial dan ekonomi yang menyebabkan mereka terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, di mana data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial, yang terdiri dari hierarki kekuasaan, kebijakan pemerintah, dan dominasi kelompok mayoritas, berperan signifikan dalam memperkuat marginalisasi komunitas adat. Selain itu, faktor ekonomi, akses terbatas terhadap sumber daya, serta kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan juga memperburuk kondisi marginalisasi mereka. Penelitian ini menyarankan adanya kebijakan inklusif dan pemberdayaan komunitas adat sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan dan memulihkan hak-hak komunitas adat Malaka.

Kata Kunci: *Struktur Sosial, Marginalisasi, Komunitas Adat Malaka*

Abstract

This research aims to analyze the role of social structure in the process of marginalization of indigenous communities in Malacca. Malacca's traditional communities, which have unique traditions and culture, experience social and economic pressures that cause them to be marginalized in various aspects of life. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method, where data is obtained through direct observation, in-depth interviews and literature study. The research results show that social structures, consisting of power hierarchies, government policies, and the dominance of majority groups, play a significant role in strengthening the marginalization of indigenous communities. Apart from that, economic factors, limited access to resources, and lack of participation in decision making also worsen their conditions of marginalization. This research suggests inclusive policies and empowerment of indigenous communities as an effort to reduce inequality and restore the rights of Malacca's indigenous communities.

Keyword: *Social Structure, Marginalization, Malacca Traditional Community*

PENDAHULUAN

Proses marginalisasi komunitas adat merupakan isu sosial yang kerap terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Komunitas adat Malaka, yang terletak di Nusa Tenggara Timur, adalah salah satu kelompok yang mengalami marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Marginalisasi yang dialami komunitas adat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga terkait dengan identitas budaya, akses terhadap sumber daya, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan politik dan sosial. Struktur sosial, sebagai elemen penting dalam interaksi masyarakat, berperan signifikan dalam memperkuat ataupun menantang proses marginalisasi ini.

Struktur sosial merupakan pola hubungan dan jaringan yang terorganisir dalam masyarakat, yang mencakup institusi, peran, norma, dan hierarki yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok. Menurut Emile Durkheim (2020) struktur sosial adalah suatu keteraturan yang terbentuk dari relasi sosial yang stabil dan permanen. Dalam pandangan Durkheim (2020) masyarakat diatur oleh solidaritas mekanik dan organik, di mana solidaritas mekanik didominasi oleh keseragaman dan kepercayaan bersama dalam masyarakat yang homogen, sedangkan solidaritas organik didasarkan pada perbedaan dan ketergantungan dalam masyarakat yang kompleks. Dalam konteks marginalisasi komunitas adat Malaka, proses marginalisasi ini sebagian besar dapat dipahami sebagai hasil dari struktur sosial yang cenderung tidak memberi ruang bagi perbedaan dan keberagaman budaya komunitas adat tersebut, yang pada akhirnya menempatkan mereka dalam posisi subordinat.

Weber (2019) menekankan bahwa kekuasaan dalam masyarakat didistribusikan secara tidak merata, dan hal ini sering kali tercermin dalam struktur sosial yang ada. Kekuasaan

politik dan ekonomi yang terpusat pada kelompok mayoritas atau elit, berkontribusi pada marginalisasi kelompok-kelompok yang berada di luar pusat kekuasaan tersebut, termasuk komunitas adat. Dalam konteks Malaka, komunitas adat sering kali tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya alam dan keputusan politik, karena struktur kekuasaan yang lebih menguntungkan kelompok dominan di wilayah tersebut. Hal ini memperkuat ketidaksetaraan dan memarjinalkan mereka dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan kebijakan lingkungan.

Pierre Bourdieu (2021) bahwa struktur sosial tidak hanya terbentuk melalui kekuasaan politik dan ekonomi, tetapi juga melalui modal sosial dan kultural yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Modal kultural, seperti pendidikan, bahasa, dan nilai-nilai tradisional, memainkan peran penting dalam posisi sosial suatu komunitas. Komunitas adat Malaka, yang mungkin memiliki modal kultural yang berbeda dengan kelompok mayoritas, seringkali dianggap tidak relevan atau diabaikan dalam konteks modernitas dan globalisasi. Kondisi ini semakin memperparah marginalisasi mereka, karena modal kultural mereka tidak diakui atau dianggap tidak bernilai dalam sistem sosial yang lebih luas.

Gramsci (2022) berpendapat bahwa kelompok dominan dalam masyarakat tidak hanya menguasai melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui kontrol ideologis. Hegemoni ini memungkinkan kelompok mayoritas atau elit untuk menetapkan norma-norma sosial yang menguntungkan mereka, sementara kelompok minoritas, seperti komunitas adat, dipaksa untuk menyesuaikan diri atau tetap terpinggirkan. Dalam kasus komunitas adat Malaka, hegemoni ini tercermin dalam bagaimana kebijakan pembangunan sering kali tidak memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan mereka, yang pada akhirnya semakin memperkuat proses marginalisasi.

Dengan mengkaji peran struktur sosial dalam proses marginalisasi komunitas adat Malaka melalui lensa teori-teori sosiologi di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana struktur sosial berfungsi sebagai instrumen kekuasaan dan ketidaksetaraan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi solusi potensial yang dapat memberdayakan komunitas adat Malaka dan mengurangi ketimpangan sosial yang mereka hadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami peran struktur sosial dalam proses marginalisasi komunitas adat di Malaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman dan perspektif komunitas adat terkait marginalisasi yang mereka alami. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari anggota komunitas adat, pemimpin lokal, serta pihak pemerintah setempat yang terlibat dalam kebijakan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, observasi langsung juga dilakukan untuk memahami dinamika sosial dan budaya komunitas adat di lingkungan mereka. Studi literatur terhadap dokumen-dokumen resmi, kebijakan pemerintah, serta penelitian terdahulu juga dilakukan untuk memberikan kerangka teoritis dan mendukung analisis data lapangan. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik dengan fokus pada bagaimana struktur sosial berkontribusi terhadap marginalisasi komunitas adat, baik melalui hierarki kekuasaan, kebijakan publik, maupun norma sosial yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai marginalisasi komunitas adat Malaka serta mengidentifikasi peluang untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa struktur sosial di Malaka memiliki peran yang signifikan dalam proses marginalisasi komunitas adat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terungkap bahwa hierarki kekuasaan yang didominasi oleh kelompok elit politik dan ekonomi lokal menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terpinggirkannya komunitas adat. Para pemimpin adat menyampaikan bahwa mereka jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan akses lahan dan sumber daya alam, yang merupakan bagian penting dari kehidupan dan identitas mereka. Struktur kekuasaan ini memperkuat dominasi kelompok mayoritas, sementara komunitas adat semakin kehilangan kontrol atas tanah adat mereka.

Selain itu, ditemukan bahwa kebijakan pemerintah daerah yang bersifat top-down cenderung tidak mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan komunitas adat. Misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur dan program modernisasi sering kali dilakukan tanpa konsultasi dengan masyarakat adat, sehingga banyak dari proyek tersebut justru merusak lahan pertanian tradisional dan situs-situs budaya yang mereka anggap sakral. Hal ini menciptakan ketegangan antara pemerintah dan komunitas adat, yang merasa hak-hak mereka diabaikan. Data juga menunjukkan bahwa program pemberdayaan

ekonomi yang diluncurkan pemerintah lebih menguntungkan kelompok mayoritas yang memiliki akses lebih baik terhadap modal dan teknologi, sementara komunitas adat dibiarkan tertinggal dengan minimnya dukungan untuk mempertahankan cara hidup mereka yang tradisional.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini mengidentifikasi adanya diskriminasi budaya dalam struktur sosial Malaka. Modal kultural yang dimiliki komunitas adat, seperti bahasa, nilai-nilai tradisional, dan pengetahuan lokal, tidak diakui oleh masyarakat umum sebagai sesuatu yang bernilai. Akibatnya, komunitas adat mengalami marginalisasi kultural, di mana budaya mereka dianggap inferior dibandingkan dengan budaya modern yang diadopsi oleh kelompok mayoritas. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya partisipasi komunitas adat dalam sistem pendidikan formal, yang cenderung lebih menekankan pada nilai-nilai dan pengetahuan modern, sehingga generasi muda komunitas adat semakin terpisah dari warisan budaya mereka.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa marginalisasi komunitas adat Malaka merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang dipengaruhi oleh interaksi antara kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya. Struktur sosial yang ada di Malaka tidak hanya memperkuat ketidaksetaraan, tetapi juga membatasi akses komunitas adat terhadap sumber daya penting dan peluang untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam pendekatan kebijakan pemerintah dan struktur sosial yang lebih inklusif untuk mengurangi marginalisasi komunitas adat dan memastikan keberlanjutan budaya serta kesejahteraan mereka. Menurut Weber (2019) menjelaskan bahwa stratifikasi sosial muncul dari distribusi kekuasaan dalam masyarakat, baik dalam bentuk ekonomi, status, maupun otoritas politik. Dalam konteks Malaka, struktur sosial didominasi oleh kelompok elit politik dan ekonomi lokal, yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol akses terhadap sumber daya seperti lahan dan modal. Dominasi elit ini menunjukkan adanya stratifikasi sosial yang memperkuat marginalisasi komunitas adat yang berada di lapisan sosial bawah. Mereka mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya penting, sehingga semakin tersingkir dari proses pengambilan keputusan.

Antonio Gramsci (2022) menjelaskan bagaimana kelompok dominan mengontrol masyarakat, tidak hanya melalui kekuatan politik atau ekonomi, tetapi juga melalui dominasi ideologis. Dalam penelitian ini, marginalisasi komunitas adat Malaka sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan top-down yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal tanpa melibatkan partisipasi komunitas adat. Proses ini menggambarkan hegemoni kelompok mayoritas yang mengabaikan nilai-nilai dan kepentingan komunitas adat. Proyek-proyek

modernisasi dan pembangunan infrastruktur yang merusak tanah adat serta situs-situs budaya mereka merupakan bentuk dari dominasi ideologis yang menciptakan ketimpangan dan penindasan sistemik. Gramsci (2022) berpendapat bahwa hegemoni ini berlangsung melalui "persetujuan" atau ketidakmampuan komunitas minoritas untuk melawan sistem, karena mereka tidak memiliki kekuasaan struktural dan akses ke alat-alat dominasi seperti media atau kebijakan.

Pierre Bourdieu (2021) dengan konsepnya tentang modal kultural dapat menjelaskan bagaimana diskriminasi budaya terjadi dalam struktur sosial Malaka. Modal kultural mencakup pengetahuan, bahasa, keterampilan, dan simbol-simbol budaya yang diakui sebagai berharga oleh masyarakat. Dalam kasus komunitas adat Malaka, modal kultural mereka, seperti pengetahuan lokal, bahasa, dan tradisi, tidak diakui oleh masyarakat umum yang cenderung memprioritaskan nilai-nilai modern. Hal ini menciptakan marginalisasi kultural, di mana komunitas adat dianggap "*inferior*" dibandingkan dengan kelompok mayoritas yang mengadopsi budaya modern. Akibatnya, komunitas adat kehilangan posisi mereka dalam hierarki sosial dan terpinggirkan secara simbolis maupun struktural.

Ruth Lister (2022) bahwa eksklusi sosial terjadi ketika individu atau kelompok dikecualikan dari akses ke sumber daya, partisipasi politik, atau kehidupan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, komunitas adat Malaka mengalami eksklusi dari sistem pendidikan, kebijakan ekonomi, dan proses pembangunan yang mengabaikan kepentingan mereka. Hal ini diperparah oleh rendahnya partisipasi mereka dalam pendidikan formal, yang menyebabkan generasi muda komunitas adat semakin terpisah dari warisan budaya mereka, dan pada akhirnya mengurangi kemampuan mereka untuk bersaing secara sosial maupun ekonomi.

Rawls (2021) menyatakan bahwa keadilan sosial harus didasarkan pada distribusi yang adil dari sumber daya dan peluang dalam masyarakat. Namun, kebijakan ekonomi yang tidak mendukung komunitas adat, dan justru menguntungkan kelompok mayoritas, menciptakan ketidakadilan distributif. Komunitas adat tidak mendapatkan akses yang setara terhadap modal dan teknologi, sehingga mereka kesulitan untuk mempertahankan cara hidup tradisional mereka di tengah tekanan modernisasi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menguatkan bahwa marginalisasi komunitas adat Malaka merupakan hasil dari interaksi berbagai struktur kekuasaan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendominasi. Dominasi ini tidak hanya memperkuat ketidaksetaraan struktural tetapi juga menghalangi komunitas adat untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Maka dari itu, diperlukan perubahan struktural yang lebih inklusif dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan komunitas adat serta

menghargai modal kultural mereka, agar marginalisasi yang terjadi dapat diminimalkan dan kesejahteraan mereka dapat terjamin.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa marginalisasi komunitas adat Malaka merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Kekuasaan politik dan ekonomi yang terkonsentrasi pada kelompok elit lokal memperkuat hierarki sosial yang tidak adil, yang menyebabkan komunitas adat kehilangan akses terhadap sumber daya dan proses pengambilan keputusan. Dominasi ideologis kelompok mayoritas, yang diwujudkan melalui kebijakan top-down, semakin mengesampingkan kepentingan komunitas adat, dengan proyek modernisasi yang seringkali merusak lahan adat dan situs budaya mereka.

Dalam konteks kultural, modal kultural komunitas adat, seperti bahasa dan tradisi, seringkali dianggap tidak bernilai oleh masyarakat luas yang lebih menghargai budaya modern. Hal ini memperkuat marginalisasi kultural yang dialami oleh komunitas adat. Komunitas ini tidak hanya dikecualikan dari akses ke sumber daya ekonomi dan politik, tetapi juga terputus dari sistem pendidikan formal yang cenderung mempromosikan nilai-nilai modern. Ketidakadilan yang muncul dari kebijakan ekonomi pemerintah daerah semakin memperburuk kondisi ini, di mana kelompok mayoritas lebih diuntungkan dibandingkan komunitas adat.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan mendasar dalam struktur sosial dan kebijakan pemerintah yang lebih inklusif. Perubahan ini harus memastikan bahwa komunitas adat terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, serta menghormati dan mengakui modal kultural yang mereka miliki. Hanya dengan pendekatan ini marginalisasi yang dialami oleh komunitas adat Malaka dapat diatasi, dan kesejahteraan mereka dapat terjamin dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Emile Durkheim (2020). *The Elementary Forms of Religious Life*, 20th Edition. New York: Free Press.
- Gramsci, Antonio. (2022). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pierre Bourdieu (2021). *An Outline of Theory of Practice*. Terj dari Bahasa Perancis oleh Richard Nice, Cambridge: Cambridge University Press.
- Rawls (2021). *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press.
- Ruth Lister (2022). *Inclusive Citizenship, Gender and Poverty: Some implications for*

education for citizenship. United Kingdom: Polity Press.

Weber, Max (2019). *Essays in Sociology*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar